



PENGANTAR UMUM

RDPU KOMISI IV DPR RI DENGAN

15 KEPALA UPT LINGKUP DITJEN

KSDAE

Oleh :
Kepala BBKSDA RIAU



PENGELOLAAN 552 KAWASAN KONSERVASI

DENGAN LUAS 27, 14 JUTA HEKTARE



DATA DIREKTORAT PIKA, Des 2017



552 TOTAL 27.140.369,02

TAMAN NASIONAL BARU:

TN Zamrud (Riau), TN Gunung Maras (Babel), TN Gandang Dewata (Sulbar).

STATUS INTERNASIONAL KAWASAN KONSERVASI:



mega biodiversity country



Mamalia

Burung

Amphibia

Reptilia

Ikan

Moluska

Nematoda

Arthropoda

Anthozoa

echinodermata

Polychaeta

Flora

Alga

Mikroba

FALSAFAH KONSERVASI

- Filosofi dasar UU 5 tahun 1990 (yakni : perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan lestari) mengacu pada Strategi Konservasi Dunia (*Worlds Conservation Strategy*) 1984, yang bersifat universal.
- ekosistem adalah hamparan luas yang terdiri dari bentang alam daratan sampai bentang alam perairan saling berkaitan satu dengan yang lain, dalam bidang konservasi dikenal istilah :
“ridge to reef”

EFEKTIVITAS UU NO. 5 TAHUN 1990 DALAM PENGELOLAAN BBKSDA RIAU

Kepentingan strategis (panas bumi)

- PP 28 Tahun 2011 jo. PP 108 Tahun 2015 Pengelolaan KSA dan KPA,
- Permen LHK P.46 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di TN, Tahura, dan TWA

Pembangunan Strategis Nasional Sesuai Perpres No. 3 Tahun 2016 jo. 58 th2017 (Jalan Strategis, Listrik, Pertahanan, Jaringan Telekomunikasi)

- PP 28 tahun 2011
- Permenhut No. P.85 tahun 2014
- Permen LHK No. P44 tahun 2017 tentang Kerjasama dalam KSA dan KPA

Pemberdayaan Masyarakat

- PP 108 tahun 2015
- Permen LHK No. 43 tahun 2017 tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA dan KPA

Pengembangan Destinasi Wisata Alam

- PP 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, TWA dan Tahura.

Pengawetan dan Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

- PP 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- PP 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis dan Tumbuhan Satwa Liar.

Pemanfaatan Massa Air Dan Energi Air

- PP No 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA
- Permenhut No P.64/Menhut- II/2013.

Kepentingan Masyarakat Tradisional , Religi, Budaya, dan Sejarah

- PP No 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA
- Permenhut No P.76/Menhut-II/2015 tentang Kriteria Zona dan Blok KSA dan KPA.

MATERI YANG DIPERKUAT DALAM UU 5 TAHUN 1990

NO	MATERI	DASAR PERUBAHAN	PENJELASAN
1	NORMA DAN SANKSI PIDANA	<ul style="list-style-type: none"> - Norma blm Mencakup seluruh TP Bid. KSDAE - Sanksi blm memberi efek jera 	<ul style="list-style-type: none"> - Norma pidana atas SDG dan TSL tidak dilindungi belum diatur - Sanksi diperberat terutama pidana denda dan pidana tambahan - Penambahan alat bukti
2	KEWENANGAN KEPOLISIAN KHUSUS DAN PPNS	<ul style="list-style-type: none"> • Psl. 6 dan Psl. 7 KUHAP • UU 2/2002 Kepolisian RI • Psl. 3 UU No. 2/2002 ttg Kepolisian RI 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum diatur kewenangan menangkap dan menahan - Kewenangan penyelidikan /pengumpulan alat bukti sangat terbatas - Belum diatur kewenangan Kepolisian khusus / Polhut
3	PERANSERTA MASYARAKAT DAN HAK-HAK ADAT/ TRADISIONAL	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres RPJMN - Putusan MK N. 35/PUU-X/2012 TTG Hutan Adat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemitraan konservasi - Mengakomodir hak-hak masyarakat adat dan kearifan lokal

NO	MATERI	DASAR	PENJELASAN
1	KEAMANAN HAYATI	UU No.21/2004 Ratifikasi Protokol Cartagena	<ul style="list-style-type: none"> - Invasif spesies - Produk rekayasa genetik - Penularan penyakit/zoosis
2	KAWASAN EKOSISTEM BERNILAI TINGGI	UU No.5/1990 belum mengakomodir kawasan ekosistem esensial sebagai bagian dari sistem penyangga kehidupan	<ul style="list-style-type: none"> - Konservasi TSL dihabitat alami diluar kawasan konservasi
3	PENGELOLAAN TAMAN BURU	Psl. 1 angka 12 jo Psl. 7 UU 41/1999	<ul style="list-style-type: none"> - Belum dimasukkan menjadi bagian KPA - Belum ada pengaturan pengelolaanya
4	AKSES DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG)	UU No.11/2013 Ratifikasi Protokol Nagoya	<ul style="list-style-type: none"> - Akses pemanfaatan SDG - Pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG
5	ASPEK KEPERDATAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF	UU 5/1990 belum mengakomodir aspek perdata dan administratif sebagai prinsip Ultimum Remedium terhadap penegeaa Saksi Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Hak gugat Pemerintah - Gugatan calas action - Denda administratif - Paksaan pemerintah

TERIMA KASIH
